

ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 45 PADA KOMITE NASIONAL UNTUK RAKYAT PALESTINA CABANG SAMARINDA

Oleh :

Muhammad Teguh Satria
1101035009

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Mulawarman
Samarinda, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran system pencatatan dan kebijakan akuntansi dalam pelaporan keuangan yang diterapkan oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Cabang Samarinda serta untuk dapat menganalisa bagaimana proses akuntansi dalam mempersiapkan laporan keuangan dari entitas yang diteliti, juga membandingkannya dengan ketentuan yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis dengan cara mengumpulkan data, menyusun, menginterpretasikan serta menganalisisnya sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai gambaran yang sebenarnya, kemudian membandingkannya dengan PSAK Nomor 45. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Untuk memperoleh data yang relevan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan masih dibuat dalam bentuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Organisasi juga tidak melakukan penilaian harga perolehan dan perhitungan penyusutan untuk aset-aset tetap yang dimilikinya, sehingga nilai aktiva tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Laporan keuangan yang diterapkan oleh Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Cabang Samarinda belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Kata kunci :Laporan Keuangan, PSAK No. 45, Organisasi Nirlaba

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang keagamaan serta advokasi. Karakter dan tujuan organisasi nirlaba memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan organisasi bisnis. PSAK Revisi 2015 No.45 menjelaskan bahwa perbedaan ada pada cara organisasi nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak seperti kepemilikan pada organisasi bisnis yang mengharapkan adanya pengembalian atas donasi yang mereka berikan. Walaupun donatur tidak mengharapkan adanya pengembalian atas sumbangan mereka, mereka tetap menginginkan pelaporan, dan pertanggung jawaban atas dana yang mereka berikan. Para donatur ingin tahu bagaimana dana yang mereka berikan dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kepentingan publik buka untuk di gelapkan.

Salah satu bentuk organisasi nirlaba dengan bentuk amal yaitu adalah organisasi jasa sukarelawan. Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) merupakan organisasi jasa sukarelawan, sehingga dapat dikategorikan sebagai organisasi nirlaba karena memperoleh sumberdaya

untuk melakukan aktivitas operasinya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan.

KNRP merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba/entitas nirlaba. Seperti halnya organisasi nirlaba lainnya, KNRP perlu melakukan pencatatan pengeluaran dan pendapatan, serta menyusun laporan keuangan sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada masyarakat. Keterbukaan laporan keuangan KNRP sangatlah penting agar pertanggungjawaban keuangan menjadi jelas dan dapat meningkatkan kepercayaan donatur yang telah memberikan donasinya kepada KNRP untuk mengelola dana tersebut.

Adanya tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik serta pentingnya laporan keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba, peneliti merasa perlu dilakukan pembahasan secara mendalam mengenai laporan keuangan yang mengacu pada PSAK 45, disertai dengan melakukan analisis lebih mendalam pada laporan keuangan. Maka dari itu peneliti ingin melakukan analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 pada Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) Cabang Samarinda.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah laporan keuangan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP) sudah sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45 ?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penyusunan laporan keuangan KNRP Cabang Samarinda pada tahun 2016 dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (Komang, 2008:45).

Karakteristik Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba atau organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut (Mahsun, 2006:201) :

- a) Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.
- b) Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas tersebut.
- c) Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi atau pembubaran entitas.

Standar Akuntansi Keuangan pada Organisasi Nirlaba

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terdapat standar khusus untuk organisasi nirlaba yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 45. PSAK No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk memfasilitasi seluruh organisasi nirlaba nonpemerintah.

Jenis Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Berdasarkan PSAK 45, organisasi nirlaba perlu menyusun laporan keuangan setidaknya 4 jenis laporan keuangan sebagai berikut (Sujarweni, 2015:216):

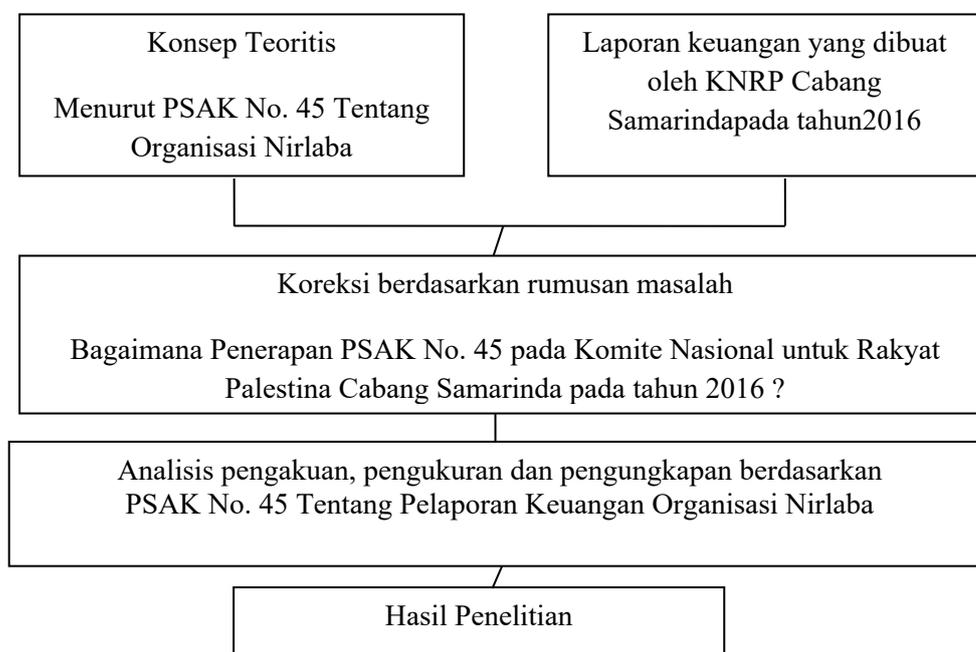
1. Laporan posisi keuangan (neraca) pada akhir periode laporan menyajikan kekayaan (Aset). Penyajian Aset diurut dari Aset yang paling likuid yaitu Kas dan Setara Kas sampai dengan

yang paling tidak likuid yaitu Aset Tetap. Selanjutnya menyajikan kewajiban (Liabilitas) dan Aset Bersih. Kewajiban disajikan berdasarkan urutan jatuh temponya. Sedangkan Aset Neto disajikan berdasarkan urutan Aset Neto yang tidak terikat, terikat sementara, dan terikat permanen.

2. Laporan aktivitas untuk suatu periode pelaporan. Organisasi nirlaba tidak memiliki laporan laba rugi, namun laporan ini dapat disamakan dengan laporan aktivitas. Informasi utama dalam laporan laba rugi adalah komponen laba atau rugi yang dihasilkan. Sementara itu, informasi utama dalam laporan aktivitas terletak pada perubahan aset neto yang dikelola organisasi nirlaba.
3. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan. Laporan arus kas dalam organisasi nirlaba sama dengan laporan arus kas pada organisasi bisnis, yaitu; arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Metode penyusunan laporan arus kas pun bisa menggunakan metode langsung maupun metode tidak langsung.
4. Catatan atas laporan keuangan. Tujuan utama catatan atas laporan keuangan adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas laporan keuangan organisasi nirlaba. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan mencakup antara lain: (i) Pendahuluan, (ii) Kebijakan akuntansi, (iii) Penjelasan atas pos – pos laporan realisasi anggaran / laporan operasional, (iv) Penjelasan atas pos – pos neraca, serta (v) Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menganalisis penyajian laporan keuangan yang dilakukan KNRP dengan mengacu pada ketentuan PSAK No.45. Kerangka pemikiran sebagaimana diuraikan sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari proses pencatatan transaksi – transaksi keuangan yang terjadi selama satu periode akuntansi. Dalam hal ini laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban KNRP yang terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan yaitu laporan yang memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan aset neto pada waktu tertentu.
2. Laporan Aktivitas adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program.
3. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu.
4. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan penjelasan atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan posisi keuangan.

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah KNRP yang merupakan suatu organisasi nirlaba/lembaga kemanusiaan yang peduli terhadap permasalahan masjid Al Aqsha dan isu kemanusiaan di Palestina.

Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dapat berupa data dokumenter. Dalam penelitian ini data dokumenter yang digunakan berupa :

- a. Jurnal transaksidan Laporan KNRP periode tahun 2016.
- b. Laporan KNRP periode tahun 2016.
- c. Kebijakan akuntansi KNRP periode tahun 2016.

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Metode Wawancara.
- b. Analisis data sekunder.

Metode Analisis

Metode analisis digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif komparatif, yakni membandingkan antara teori PSAK No. 45 dan Laporan Keuangan KNRP. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menganalisis data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan.
2. Mengidentifikasi perlakuan terhadap pendapatan.
3. Mengidentifikasi perlakuan terhadap beban.
4. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban.
5. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.

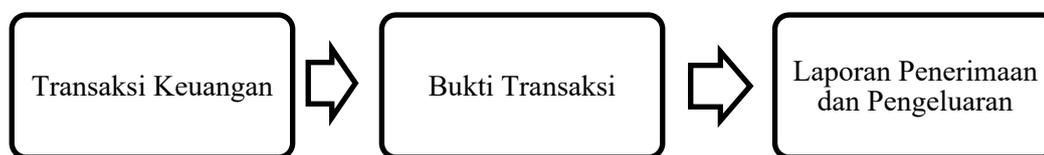
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum KNRP Cabang Samarinda

Dilatar belakangi oleh rasa solidaritas terhadap penduduk Palestina yang mengalami invasi dan intervensi secara fisik di wilayahnya, Indonesia memiliki sebuah wadah yang berkonsentrasi untuk turut membantu menghadapi konflik yang berkepanjangan yaitu KNRP. KNRP telah banyak menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial, ceramah, seminar dan seni untuk menggalang dana serta opini masyarakat untuk masalah kemanusiaan di Palestina. KNRP Samarinda diresmikan oleh KNRP Kalimantan Timur sebagai bagian yang terintegrasi pada 1 Januari 2016. KNRP Cabang Samarinda telah memiliki susunan struktur organisasi yang dinilai ideal untuk menjalankan visi dan misi organisasi.

Pencatatan Transaksi dan Laporan Keuangan pada KNRP Cabang Samarinda

KNRP Cabang Samarinda memberlakukan pencatatan terhadap transaksi keuangan dengan dasar pencatatan berbasis kas (*cash basis*). KNRP Cabang Samarinda mencatat laporan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas harian yang meliputi penerimaan dan pengeluaran. Catatan-catatan harian ini kemudian akan direkap pada akhir bulan untuk dilaporkan secara berkala. Belum ada klasifikasi akun tertentu pada transaksi pengeluaran atau pemasukan harian. Prosedur akuntansi yang berlaku pada KNRP Cabang Samarinda adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 Prosedur Akuntansi KNRP Samarinda

Hasil Analisis

Berdasarkan analisis, maka terdapat pembahasan sebagai berikut :

1. Dalam kesehariannya KNRP Cabang Samarinda tidak melakukan penjurnalan atau posting ke buku besar. Berdasarkan informasi yang tertera pada lampiran No. 1 dan No. 2 pencatatan dilakukan dengan sederhana yakni melakukan pencatatan pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Seharusnya pencatatan jurnal dilakukan terhadap setiap peristiwa ekonomi yang terjadi guna memudahkan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
2. Penyajian laporan keuangan KNRP Cabang Samarinda hanya melaporkan penerimaan dan penggunaan dana (lihat lampiran No. 1 dan No. 2), sedangkan menurut PSAK No. 45 laporan organisasi nirlaba seharusnya terdiri atas laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan.
3. Pada KNRP Cabang Samarinda belum melaksanakan pengklasifikasian terhadap setiap donasi yang masuk. Menurut PSAK No. 45 donasi atau pendapatan yang diterima harus dipisah dan dikelompokkan ke dalam aset netto (aset yang tidak terikat), aset netto terikat temporer dan aset netto terikat permanen. Pengelompokkan aset netto didasarkan pada ada atau tidaknya pembatasan yang diberikan oleh donatur, baik dalam hal penggunaan maupun jangka waktu. Pengelompokkan ini bertujuan untuk memberikan informasi baik jumlah, tujuan penggunaan maupun periode aset netto tersebut serta mempermudah pengawasan terhadap perlakuan aset netto tersebut.
4. Berdasarkan informasi yang tertera pada lampiran No. 3, KNRPCabang Samarinda selama ini tidak melakukan pencatatan terhadap harga perolehan aset tetap yang dimiliki serta perhitungan penyusutannya. KNRP Cabang Samarinda hanya melakukan pencatatan dalam bentuk daftar inventaris sehingga laporan keuangan yang disajikan tidak menampilkan kondisi riil nilai aset yang dimiliki.
5. Pada analisis sebelumnya ditemukan data bahwa pada akhir tahun 2016 perolehan aset KNRP Cabang Samarinda berdasarkan harga perolehan sebesar Rp 150.203.950,- dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp 67.260.127,- berdasarkan perhitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 (lihat lampiran No. 5) serta Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (lihat lampiran No. 6). Artinya bahwa terjadi penurunan nilai aset sebesar nominal beban penyusutan yang belum disajikan, yakni sebesar Rp 67.260.127,-.
6. Pada awal tahun 2016 KNRPCabang Samarinda tidak melaporkan berapa saldo aset netto yang dimiliki, sehingga diasumsikan saldo aset netto adalah Rp 0,-. Pada akhir tahun 2016 berdasarkan data yang diperoleh aset netto KNRP Cabang Samarinda adalah sebesar Rp 347.234.344,- yang terdiri dari aset netto tidak terikat sebesar Rp 264.290.521,- dan aset netto terikat permanen sebesar Rp 82.943.823,-.
7. KNRP Cabang Samarinda selama ini belum melakukan pencatatan nilai perolehan aset yang dimiliki. Informasi yang diperoleh bahwa aset yang dimiliki hanya dicatat dalam bentuk inventaris barang (lihat lampiran No. 3).

8. Berdasarkan informasi yang tertera pada lampiran No. 3, KNRP Cabang Samarinda selama ini belum melakukan pencatatan atas nilai penyusutan aset yang terjadi selama periode berjalan, sehingga nilai aset tidak dilaporkan dalam laporan keuangan.
9. Berdasarkan informasi yang tertera pada lampiran No. 1 dan No. 2, KNRP Cabang Samarinda tidak menyajikan laporan keuangan berupa laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
10. KNRP Cabang Samarinda selama ini hanya menyajikan penerimaan dan penggunaan dana dalam laporan keuangan.
11. KNRP Cabang Samarinda belum menerapkan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan format laporan keuangan organisasi nirlaba yang terdapat dalam PSAK No. 45.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis dan pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa KNRP Cabang Samarinda belum menerapkan PSAK No. 45 dalam melaporkan kondisi keuangan instansi selama periode akuntansi tahun 2016.

Saran

Setelah melalui proses analisis dan pembahasan dalam skripsi ini, diperoleh beberapa saran bagi KNRP Cabang Samarinda untuk menjadi sarana perbaikan untuk ke depannya sebagai berikut :

1. KNRP Cabang Samarinda seharusnya melakukan pencatatan terhadap harga perolehan aset dan melakukan penilaian penyusutan terhadap aset yang dimiliki.
2. KNRP Cabang Samarinda sebaiknya menerapkan PSAK No. 45 dalam penyajian laporan keuangan, sehingga KNRP Cabang Samarinda memiliki laporan keuangan yang berkualitas sekaligus mewujudkan bentuk akuntabilitas organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardana, Komang, dkk. 2008. *Perilaku Keorganisasian Edisi Pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Drs. S. Munawir. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Dwi, Martani, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan Menengah berbasis PSAK Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasibuan, David. 2010. *Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Mandiri Anak Bangsa Nusantara dalam Kaitannya dengan Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan*. Surabaya : STIESIA. Jurnal Ilmiah Kesatuan Nomor 1 Volume 12.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta : IAI.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba*. Jakarta : IAI.
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*. Jakarta : Grasindo.
- Jusup, Al. Haryono. 2011. *Dasar-dasar Akuntansi. Jilid I*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi UGM. Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, dkk. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Rizky, Diyani Ade. 2013. *Analisis Penerapan PSAK No.45 pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya*. Surabaya : STIESIA. Jurnal Ilmiah.
- Suendra, Yeyen. 2014. Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Masjid (Studi Kasus Masjid Islamic Centre di Samarinda), *Skripsi*. Universitas Mulawarman. Samarinda.
- Suwardjono. 2008. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.